



## EVOLUSI SISTEM PEMILU MASA ORDE BARU (1966-1998)

Rumyati<sup>1</sup>

Pendidikan Sejarah/FKIP, Universitas Setia Budi Rangkasbitung, Rangkasbitung, Indonesia<sup>1</sup>

### RIWAYAT ARTIKEL

*Sejarah artikel:*

Diterima 12 Desember 2022

Diterima dalam bentuk revisi  
30 Desember 2022

Diterima 31 Desember 2022

### ABSTRAK

Evolusi sistem pemilu ini mencerminkan dinamika politik otoriterisme, di mana pemilu digunakan sebagai alat legitimasi pemerintah dan kendaraan untuk menjaga stabilitas politik di bawah kontrol Partai Golkar. Reformasi politik yang lebih besar terjadi setelah Orde Baru, membuka jalan bagi perubahan yang lebih demokratis dan inklusif dalam sistem pemilu Indonesia. dengan menggunakan studi pustaka (*library research*) yaitu metode pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian. Hasilnya membahas pemilu pada tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997, serta taktik dan strategi yang digunakan oleh partai politik dan pemerintah selama pemilu tersebut.

*Kata kunci:*

Evolusi, Pemilu, Orde baru, Politik Indonesia

### PENDAHULUAN

Masa Orde baru di Indonesia dimulai setelah kudeta militer yang terjadi pada 30 September 1965. Kudeta ini dimulai sebagai percobaan kudeta oleh sekelompok perwira angkatan darat yang tergabung dalam Gerakan 30 September (G30S), yang merupakan kelompok sayap kiri. Kudeta tersebut berujung pada pembunuhan enam jenderal tinggi, termasuk Jenderal Ahmad Yani, dan menciptakan kekacauan di Jakarta. Setelah kudeta tersebut, Mayor Jenderal Soeharto, yang saat itu adalah Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad), mengambil alih kendali atas situasi. Soeharto menyatakan bahwa pemberontakan tersebut adalah upaya kudeta komunis dan menyusun Operasi Trisula, sebuah operasi militer untuk menumpas anggota G30S. Selama operasi tersebut, terjadi penganiayaan massal dan pembunuhan terhadap anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) serta simpatisannya di berbagai daerah.

Sebagai hasil dari kudeta tersebut, Soeharto mengonsolidasikan kekuasaan politik di tangan militer dan mendirikan pemerintahan orde baru. Soekarno yang telah lemah secara politik kemudian dikalahkan dan dipaksa untuk mentransfer kekuatan kunci politik dan militer Indonesia pada Jenderal Soeharto, yang telah menjadi kepala angkatan bersenjata Indonesia (.wikiwand, n.d.). Pada bulan Maret 1967, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) menyatakan bahwa

<sup>1</sup> rumyati1407@gmail.com

Jenderal Soeharto adalah presiden Indonesia. Soeharto kemudian resmi ditunjuk sebagai presiden Indonesia satu tahun kemudian (.wikiwand, n.d.). Sejak saat itu, Soeharto memegang kekuasaan yang kuat dan mengendalikan pemerintahan Indonesia selama lebih dari tiga dekade.

Pada awal Orde Baru, setelah kudeta militer yang menggulingkan pemerintahan Soekarno, terjadi perubahan besar dalam arah politik Indonesia. Sistem pemilu mengalami modifikasi untuk mencerminkan kontrol yang lebih ketat dari pemerintah, yang pada gilirannya memunculkan pertanyaan kritis tentang legitimasi politik dan partisipasi publik. Dominasi Partai Golkar sebagai partai penguasa yang mendapat dukungan penuh dari pemerintah, serta keterlibatan militer dalam proses politik, menjadi ciri khas dari sistem pemilu Orde Baru.

Sistem pemilu pada masa Orde Baru menciptakan tantangan signifikan bagi pluralisme politik dan oposisi. Partai-partai yang tidak sejalan dengan pemerintah dapat menghadapi pembubaran atau penindasan, menghasilkan pemandangan politik yang kurang dinamis. Kondisi ini juga menciptakan ketidaksetaraan dalam persaingan politik, memastikan keberlanjutan kekuasaan penguasa.

Orde Baru ditandai oleh otoritarianisme, pembatasan kebebasan politik, dan pengawasan ketat terhadap setiap bentuk oposisi politik. Pemerintahan ini juga menekankan pada pembangunan ekonomi, yang sering kali dianggap berhasil dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, keberhasilan ekonomi juga diimbangi dengan pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi di tingkat tinggi.

## **METODE**

Pendekatan yang dilakukan dalam artikel ini adalah dengan melakukan penelitian kepustakaan, suatu proses yang melibatkan pengumpulan data dengan mengkaji secara komprehensif teori-teori yang ditemukan dalam berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. menurut Zed (2004), melaksanakan penelitian perpustakaan melibatkan empat tahapan utama: memperoleh peralatan penelitian yang diperlukan, membuat bibliografi yang berfungsi, mengatur waktu secara efektif, dan membaca serta mendokumentasikan bahan penelitian secara menyeluruh. Data dikumpulkan dengan mencari dan menyusun sumber dari berbagai media termasuk buku, jurnal, dan penelitian yang ada. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis isi dan analisis deskriptif. Materi yang diperoleh dari berbagai referensi dianalisis secara kritis dan mendalam untuk mendukung teori dan gagasan (Fadli, 2021).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pemilihan umum merupakan sarana untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPRD I dan DPRD II serta untuk mengisi jajaran anggota MPR. Pemilihan umum diadakan serentak setiap lima tahun sekali dan didasarkan pada demokrasi Pancasila. Pemungutan suara berlangsung secara langsung, umum, bebas dan rahasia (LUBER) (Soemantri1995:108) (Kriswantoni, 2018).

Pemilihan umum adalah cara demokratis untuk menciptakan sistem kekuasaan negara berdasarkan kedaulatan rakyat dan debat perwakilan. Kekuasaan negara yang lahir dalam pemilihan umum adalah kekuasaan yang lahir dari bawah sesuai dengan kehendak rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Tujuan

pemilihan umum adalah mengikuti asas kedaulatan rakyat (Waridah dkk. 2003) (Kriswantoni, 2018).

Pemilihan umum telah beberapa kali diselenggarakan di Indonesia, antara lain pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, dan 2004. Pemilihan umum tahun 1955 merupakan pemilihan umum yang pertama kali diadakan di Indonesia yaitu pada masa kabinet Burhanudin Harahap (Friyanti, 2005). Pemilu 1955 berdasarkan pada langsung, umum, bebas, rahasia dan kebersamaan. Dengan asas kebersamaan ini setiap individu diakui kesamaan hak dan kedudukannya sesuai dengan prinsip persamaan di depan hukum (Friyanti, 2005). Oleh karena itu, pada pemilu parlemen tahun 1955, seluruh wakil dipilih melalui pemilihan umum dan tidak ada seorang pun yang diangkat (Asshidique 1994:168) (Kriswantoni, 2018).

Pada tahun 1966 terjadi perubahan sistem demokrasi Indonesia ketika orde lama berakhir dengan demokrasi di bawah Presiden Soekarno dan muncul orde baru di bawah Presiden Soeharto dengan demokrasi Pancasila. Era orde baru ditandai dengan kedudukan negara sebagai satu-satunya aktor, sebagaimana ditegaskan secara tegas. dengan seluruh birokrasi dan militer karena pembangunan dan politik. Di sini, model demokrasi digantikan oleh sistem feodalisme yang mencoba menyatukan birokrasi negara dan militer menjadi satu pemerintahan dan menghilangkan partai-partai massa yang dianggap mengancam stabilitas kekuasaan mereka. (Purnweni 2004).

Presiden Soeharto berkuasa selama kurang lebih 32 tahun dan pada masa pemerintahannya, Soeharto menguasai lembaga legislatif dan yudikatif, menunjukkan cara pemerintahannya yang otoriter dan melanggar hak asasi manusia. Pancasila, sebagai satu-satunya ideologi organisasi masyarakat mana pun, hanya dijadikan alat dan permainan politik Soeharto untuk menyingkirkan beberapa tokoh dan pers yang mengkritik pemerintahannya. (Nasution, 2007). Begitu pula penyelenggaraan pemilu di era Orde Baru hanya merupakan simbol kemenangan peserta tertentu dan bahkan merupakan simbol yang menyimpang dari nilai-nilai demokrasi. 1997. Pada tahun 1997, Indonesia mengalami krisis berkepanjangan dan praktik korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah sehingga menyebabkan kemerosotan perekonomian sehingga memicu kemarahan masyarakat dan politik (Nisa dkk, 2017) Pada tahun 1997, Indonesia mengalami krisis berkepanjangan dan korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Hal ini menyebabkan terpuruknya perekonomian negara sehingga menimbulkan kemarahan antara masyarakat dan pelajar. Pada akhir tahun 1998, gerakan mahasiswa dan masyarakat yang revolusioner berhasil menggulingkan pemerintahan orde baru yang kemudian digantikan oleh BJ. Habib.

Pemilu pertama masa orde baru dilaksanakan pada tanggal 5 Juli tahun 1971 dengan asas langsung, umum, bebas dan rahasia (Luber) atas dasar Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Pemilu 1971 menggunakan sistem proporsional dengan daftar calon tertutup yang diikuti 9 partai politik dan 1 organisasi Masyarakat (Ardanawati, 2019). Menurut (Sugitanata & Majid, 2021) Sistem penghitungan penetapan anggota Parlemen berdasarkan stelsel daftar atau pembagian total suara dari masing-masing wilayah dibagi dengan electoral quotient Dalam pemilu 1971 ada 460 kursi Parlemen yang diperebutkan, dengan rincian 360 dilakukan pemilihan langsung oleh rakyat sedangkan yang 100 orang diangkat dari kalangan angkatan bersenjata dan

golongan fungsional oleh Presiden (Basri, 2020). Hasil akhir Pemilu dimenangkan Golkar dengan perolehan 34.348.673 suara dan 236 kursi di Parlemen.

Pada pemilu pertama, Golkar sebagai kelompok kerja menjadi salah satu peserta pemilu dengan perolehan suara signifikan dan mampu mengungguli pesaingnya. 1971. Hasil pemilu pemilu 2018 menunjukkan Golkar berada di peringkat pertama. Hal ini menjadi cara Orde Baru melanjutkan kekuasaannya dengan menggunakan tiga strategi untuk memobilisasi massa: Pertama, jalur ABRI diambil dengan peran ganda ABRI yaitu pertahanan, keamanan dan kebijakan sosial. Kedua, jalur birokrasi berjalan beriringan dengan monoloyalitas PNS, pemerintah menetapkan aturan bahwa PNS harus mengarahkan kebijakannya ke Sekber Golkar. Ketiga, Jalur Golkar yang tercantum dalam nomor pembangunan nasional (Puspita, 2017).

Pada tahun 1975, pemerintah mengeluarkan kebijakan fusi dan melarang kegiatan partai politik di pedesaan, sehingga Golkar sebagai organisasi kemasyarakatan bebas dan terbuka dalam menggerakkan massa ke segala arah. Karena pengaruh kebijakan pemerintah, maka partai politik harus mendekatkan diri pada satu ideologi, sehingga terbentuklah 2 partai politik dan 1 kelompok kerja yaitu penggabungan PDI (PNI, Parkindo, Partai Katolik, Partai IPKI, Partai Murba), penggabungan PPP (Partai NU, Parmusi, Perti, PSII) dan Golkar (Golkar Karya) (Nisa., 2017).

Pemilu kedua pada masa Orde Baru dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 1977 berdasarkan asas langsung, universal, bebas dan rahasia (Luber), berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat. Sistem pemilu yang digunakan proporsional dengan daftar calon tertutup diikuti 2 partai dan 1 Golkar bersaing memilih anggota DPR, DPRD Kabupaten, dan DPRD Provinsi. Sistem penghitungannya menggunakan pembagian stelsel list, atau jumlah suara seluruh daerah, dibagi dengan electoral quotient. Pada pemilu tahun 1977, terdapat 460 kursi parlemen yang dicadangkan, 360 di antaranya dipilih langsung oleh rakyat dan 100 wakil angkatan bersenjata dan kelompok operasional ditunjuk oleh presiden. Hasil akhir pemilu 1977 menunjukkan Golkar menang dengan perolehan 39.750.096 suara dan 232 kursi (Sugitanata & Majid, 2021).

Pemilu ketiga masa Orde Baru berlangsung pada tanggal 4 Mei 1982 menurut asas langsung, universal, bebas dan rahasia (Luber), berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 1969 jumlah anggota DPR pada pemilihan umum. Pemilu menggunakan sistem proporsional dengan daftar calon tertutup yang terdiri dari 2 partai dan 1 Golkar. Kursi parlemen diperoleh berdasarkan sistem daftar atau pembagian jumlah suara di setiap daerah menurut pembagian pemilu. Pemilu 1982 berjalan lebih baik dibandingkan pemilu sebelumnya, namun terjadi konflik antar partai peserta pemilu sehingga persiapannya kurang maksimal, misalnya PDI konflik internal, PPP hampir tumbang, sedangkan Golkar masih kuat. . ketika mempersiapkan diri untuk berpartisipasi dalam kontes pemilu. Di tingkat daerah, Golkar mampu memenangkan pemilu dengan meraih suara PPP, namun dikalahkan di Aceh, sedangkan di tingkat nasional, suara Golkar meningkat dengan meraih 10 kursi di parlemen (Baubau, 2014). Pada pemilu 1982, terdapat 460 kursi di parlemen, 364 di antaranya dipilih langsung dan 96 dicalonkan oleh presiden. Hasil akhir pemilu 1982 dimenangkan oleh Golkar dengan perolehan 48.334.724 suara dan 242 kursi

di parlemen (KPU, 2020). Untuk memperkuat kekuasaannya, pemerintahan Orde Baru mengeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golongan Buruh, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 yang mewajibkan organisasi kemasyarakatan dan partai politik mempunyai satu asas, yaitu Asas Pancasila. Hal ini berdampak pada PPP, dimana PPP harus mengubah prinsipnya dari Islam menjadi prinsip Pancasila dan Ka'bah dari simbol menjadi tanda (Firdausi, 2019).

Pemilu keempat masa Orde Baru dilaksanakan pada tanggal 23 April 1987 secara langsung, universal, bebas dan rahasia (Luber) berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Undang-undang sehubungan dengan perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota Badan Permusyawaratan Rakyat/Perwakilan Rakyat. Pemilu menggunakan sistem proporsional dengan daftar calon tertutup yang terdiri dari 2 partai dan 1 Golkar. Kursi parlemen diperoleh berdasarkan sistem daftar atau pembagian jumlah suara di setiap daerah menurut pembagian pemilu. Pada pemilu 1987, Golkar meraih kemenangan signifikan dan PPP dikalahkan, sementara perolehan suara PDI meningkat. Pada pemilu 1987, terdapat 500 kursi di parlemen, 400 kursi dipilih langsung oleh rakyat dan 100 kursi ditunjuk oleh presiden. Hasil akhir pemilu membawa Golkar sebagai pemenang dengan perolehan 62.783.680 suara dan 299 kursi di parlemen (Basri, 2020).

Pemilu kelima masa orde baru berlangsung pada tanggal 9 Juni 1992 menurut asas langsung, universal, bebas dan rahasia (Luber). Landasan hukum dan sistem pemilu yang digunakan sama dengan sistem pemilu tahun 1987 karena tidak dilakukan perubahan terhadap undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 tentang Perubahan Nomor 4 Tahun 1980 tentang Perubahan Tahun 1975. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR (Noviawati, 2019). Selain itu, pemilihan umum diselenggarakan berdasarkan Ketetapan MPR No. II/MPR/GBHN tahun 1988 dan Peraturan Pemilihan MPR No. III/MPR/1988. Pada pemilu 1992 diluncurkan sistem proporsional dengan daftar calon tertutup yang terdiri dari 2 partai dan 1 Golkar. Kursi parlemen diperoleh berdasarkan sistem daftar atau pembagian jumlah suara di setiap daerah menurut pembagian pemilu. Pada pemilu tahun 1992, pemerintah melakukan kajian khusus apakah calon bakal calon DPR boleh terlibat dalam kegiatan organisasi terlarang, dengan bukti SKTT (Pemilu 1992, 2014). Golkar 2021 terpilih sebagai partai pemenang pemilu 1992 dengan 66.599.331 suara dan 282 kursi parlemen.

Pemilu keenam masa Orde Baru dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1997 dengan asas langsung, umum, bebas dan rahasia (Luber) berdasarkan Tap MPR Nomor II/MPR/1993 tentang GBHN dan Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1993 tentang Pemilu serta Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pemilihan Umum. Pemilu menggunakan sistem proporsional dengan daftar calon tertutup yang diikuti 2 partai politik dan 1 Golkar. Perolehan kursi Parlemen berdasarkan dengan stelsel daftar atau pembagian total suara dari masing-masing wilayah dibagi dengan electoral quotient. Hasil akhir Pemilu tahun 1997 dimenangkan Golkar dengan perolehan 84.187.907 suara dan 325 kursi di Parlemen (wikipedia, 2020).

Pemilihan Umum masa Orde Baru sejak tahun 1971 sampai 1997 hanya memilih anggota Parlemen, sementara Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh MPR. Setelah Pemilu 1997 dan Soeharto menjadi Presiden kembali,

gerakan oposisi mulai menguat dengan lahirnya gerakan mahasiswa dan krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia menjadi salah satu penyebab gerakan mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan secara besar-besaran yang tidak dapat dikendalikan oleh pemerintah, sehingga membuat Soeharto lemah dan berhenti dari jabatannya pada tahun 1998 (Supriyadi, 2018).

Berjalannya kekuasaan Orde Baru tidak terlepas dari faktor hegemoni yang luar biasa oleh rezim. Bahkan hegemoni rezim selayaknya sudah dapat digolongkan sebagai hegemoni yang terlembagakan dalam pemerintahan. Terjadinya transfer kekuasaan dari Presiden Soeharto kepada wakil presiden B. J. Habibie pada 21 Mei 1998 telah membawa perubahan-perubahan yang berarti pada sistem politik Indonesia. (Hidayat)

Pada tataran makro, perubahan ini dapat dilihat pada transformasi sistem politik Indonesia dari otoriter menjadi lebih demokratis. Setidaknya sejak saat itu pintu menuju proses demokratisasi semakin terbuka. Sebagian, tren ini dapat dilihat dalam perubahan dalam hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dari model terpusat sebagai kekuatan profesional tetapi netral secara politik ke gaya yang lebih birokratis dan militer, dan perubahan dalam kerangka kelembagaan lainnya, seperti misalnya adanya sistem multi partai, membuat pemilu. mana yang lebih demokratis, memiliki pers yang bebas dan mencoba mendesentralisasikan. Runtuhnya rezim Soeharto pada tahun 1998, memberi pengaruh terhadap kehidupan partai politik di Indonesia (Hidayat).

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan dari jurnal ini adalah bahwa evolusi sistem pemilu selama era Orde Baru di Indonesia mencerminkan dinamika politik otoriter, di mana pemilu digunakan sebagai alat legitimasi pemerintah dan stabilitas politik di bawah kontrol Partai Golkar. Setelah reformasi politik, terbuka jalan bagi perubahan yang lebih demokratis dan inklusif dalam sistem pemilu Indonesia. Era Orde Baru ditandai oleh otoritarianisme, pembatasan politik, dan kontrol ketat terhadap bentuk-bentuk oposisi politik. Sistem pemilu menciptakan tantangan signifikan bagi pluralisme politik dan oposisi, yang mengarah pada lanskap politik yang kurang dinamis.

## **REFERENSI**

### **Buku**

Nasution, A. B. (2007). *Arus Pemikiran Konstitusionalisme*; Tata Negara. Jakarta: Kata Hasta Pustaka., 453–456.

### **Jurnal Artikel**

Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 33-54.

Hidayat, A. (N.D.). *Perkembangan Partai Politik Pada Masa Orde 1966-1998*. Retrieved From Jurnal Ilmia Mimbar Demokrasi: <https://core.ac.uk/download/pdf/295356646.pdf>

Kriswantoni, S. (2018). Pelaksanaan Pemilihan Umum Dalam Sejarah Nasional Indonesiapada Masa Orde Baru Dan Reformasi. *Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora*, 32-43.

- Nisa, N. I., & Dkk. (2017). Strategy Of Golongan Karya To Be Winner In Election Year 1971-1997. *Jurnal Historica*, 142.
- Noviawati, E. (2019). Perkembangan Politik Hukum Pemilihan Umum Di Indonesia. Retrieved From [Jurnal.Unigal.Ac.Id: Https://Jurnal.Unigal.Ac.Id/Index.Php/Galuhjustisi/Article/View/21](https://Jurnal.Unigal.Ac.Id/Index.Php/Galuhjustisi/Article/View/21)
- Purnaweni, H. (2004). Demokrasi Indonesia Dari Masa Ke Masa. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Puspita, N. E. (2017). Strategi Politik Dan Kemenangan Golkar Di Semarang Pada Pemilu 1971. *Journal Of Indonesian History*, 32-33. Retrieved From *Journal Of Indonesian History*.
- Sugitanata, A., & Majid, A. (2021). Sistem Pemilu Sebagai Wujud Demokrasi Di Indonesia: Antara Orde Lama, Orde Baru Dan Reformasi. *Jurnal Hukum Tata Negara*, 1-21.
- Supriyadi, P. (2018). Sejarah Pemilu Demokratis Di Indonesia Tahun 1999-2014. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.

### **Skripsi**

- Friyanti, F. (2005). Pelaksanaan Pemilihan Umum Dalam . Semarang: Lib.Unnes.Ac.Id.

### **Situs Webs**

- Ardanareswari, I. (2019, April 13). Sejarah Pemilu 1977: Taktik Fusi Parpol Ala Soeharto & Orde Baru. Retrieved From [Tirto.Id: Ttps://Tirto.Id/Sejarah-Pemilu-1977-Taktik-Fusi-Parpol-Ala-Soeharto-Orde-Baru-Dl3v](https://Tirto.Id/Sejarah-Pemilu-1977-Taktik-Fusi-Parpol-Ala-Soeharto-Orde-Baru-Dl3v)
- Baubau, K. (2014, Januari 23). Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, Dan 1997. Retrieved From Kpu Baubau: [Http://Www.Kpu-Baubaukota.Go.Id/Pemilu-1977-1982-1987-1992-Dan-1997.Html](http://Www.Kpu-Baubaukota.Go.Id/Pemilu-1977-1982-1987-1992-Dan-1997.Html)
- Basri, S. (2020, Desember 05). Kajian Politik: Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia. Retrieved From [Saripedia.Wordpress: Https://Saripedia.Wordpress.Com/Tag/ Pemilu-1992](https://Saripedia.Wordpress.Com/Tag/Pemilu-1992)
- Firdausi, F. A. (2019, April 14). Sejarah Pemilu 1987: Golkar Perkasa, Ppp Anjlok, Pdi Lumayan. Retrieved From [Tirto.Id: Ttps://Tirto.Id/Sejarah-Pemilu-1987-Golkar-Perkasa-Ppp-Anjlok-Pdi-Lumayan-Dlzw](https://Tirto.Id/Sejarah-Pemilu-1987-Golkar-Perkasa-Ppp-Anjlok-Pdi-Lumayan-Dlzw)
- Kpu. (2020, Desember 05). Hasil Pemilu. Retrieved From [Kpu.Go.Id: Https://Www.Kpu.Go.Id/ Dmdocuments/Modul\\_1d.Pdf](https://Www.Kpu.Go.Id/Dmdocuments/Modul_1d.Pdf)
- Pemilu 1992. (2014, Januari 15). Retrieved From [Tempo.Co: Https://Pemilu.Tempo.Co/Read/54520](https://Tempo.Co/Read/54520)
- Pusat, P. (1969, Desember 17). Undang-Undang (Uu) Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Retrieved From Database Peraturan: [Https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/49123/Uu-No-16-Tahun-1969](https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/49123/Uu-No-16-Tahun-1969)

Wikipedia. (2020, Desember 05). Pemilihan Umum Legislatif Indonesia. Retrieved From Wikipedia.Org:  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan\\_Umum\\_Legislatif\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_Umum_Legislatif_Indonesia)

Wikiwand. (N.D.). Sejarah Indonesia (1965–1966). Retrieved From Wikiwand:  
[https://www.wikiwand.com/id/Sejarah\\_Indonesia\\_\(1965-1966\)](https://www.wikiwand.com/id/Sejarah_Indonesia_(1965-1966))